

PERANAN DANA ALOKASI UMUM DAN HUBUNGANNYA DENGAN PDRB KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2011-2013

Huswatun Hasanah

Prodi Keuangan Daerah Universitas Jambi

Abstrak

Judul skripsi ini adalah Peranan Dana Alokasi Umum dan Hubungannya dengan PDRB Kabupaten Merangin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan dan kontribusi Kabupaten Merangin tahun 2001-2013, dan juga untuk mengetahui hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Hubungannya dengan PDRB dan permasalahan dalam peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Merangin. Hasil dari penelitian menunjukkan perkembangan DAU Kabupaten Merangin tahun 2001-2013 sebesar 12,90 persen, dan kontribusi DAU Kabupaten Merangin tahun 2001-2013 sebesar 63,33 persen. Hubungan antara DAU dengan PDRB Kabupaten Merangin yaitu r sebesar 0,81 persen. Adapun permasalahan dalam peningkatan DAU Kabupaten Merangin yaitu ketidaksesuaian antara kebutuhan dan peruntukan alokasi anggaran sehingga dianggap mencederai rasa keadilan daerah, Tidak sesuai kebijakan pemerintah terhadap kondisi daerah dan Lobi antara kepala daerah Kabupaten Merangin ke pemerintah pusat.

Kata Kunci : Alokasi Umum, PDRB, Merangin

Abstract

The title of this thesis is The Role of General Allocation Funds and Their Relationship with the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Merangin Regency. This study aims to identify and analyze the development and contribution of Merangin Regency from 2001 to 2013, as well as to examine the relationship between General Allocation Funds (DAU) and GRDP, and the issues in increasing the DAU in Merangin Regency. The results of the study show that the growth of the DAU in Merangin Regency from 2001 to 2013 was 12.90 percent, and its contribution during that period was 63.33 percent. The correlation between the DAU and GRDP in Merangin Regency was 0.81 percent. The issues in increasing the DAU in Merangin Regency include the mismatch between the needs and the allocation purposes, which is perceived as undermining regional fairness, the incompatibility of government policies with local conditions, and lobbying efforts by the regional head of Merangin Regency to the central government.

Keywords: General Allocation Fund, GRDP, Merangin

1. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang telah dirubah dengan Undang-undang No.8 Tahun 2005 menyatakan pemberian otonomi daerah kepada daerah di dasarkan asas-asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas nyata dan bertanggung jawab. Untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi yaitu tersedianya sumber-sumber pembiayaan sebagaimana yang di atur pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. perimbangan yang terdiri atas tiga jenis sumber dana, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasi nya tidak dapat di pisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. DAU berperan sebagai penyeimbang fiskal antara daerah (*fiskal equalization*) di Indonesia. Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal dan potensi daerah, tidak hanya terkait dengan belanja pegawai, dalam pengertian bahwa belanja pegawai tidak harus dari DAU tetapi dari APBD (PAD, Dana perimbangan diluar DAK, dan penerimaan daerah lainnya diluar hibah dan dana darurat).

Kabupaten Merangin sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dapat dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor tersier dan sekunder secara dominan yaitu sektor perdagangan/hotel/restoran, Telekomunikasi, pertanian dan transportasi yang dapat meningkatkan PAD. Namun pada kenyataannya sumber penerimaan/pendapatan tersebar kabupaten Merangin adalah Dana Perimbangan terutama Dana Alokasi Umum (DAU) yang mana Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang di tranfer dari pusat ke pemerintah daerah.

Observasi awal dari dokumentasi tentang DAU dan pendapatan asli daerah kabupaten Merangin di ketahui bahwa pada tahun 2002 dengan pendapatan DAU Rp. 131.355.291.336 meningkat sebesar Rp.2.780.616.000, tahun 2008 dengan pendapatan DAU sebesar Rp.339.161.139.000 meningkat sebesar Rp.6.974.913.000, tahun 2011 DAU sebesar Rp.416.126.312.000 dengan pendapatan pada tahun yang sama sebesar Rp.63.540.187.000 angka tersebut meningkat pada tahun 2013 pada dengan DAU sebesar Rp.565.160.895.000 dan pada tahun yang sama diperoleh pendapatan sebesar Rp.55.506.909.000, dari data dokumentasi tersebut terlihat adanya peningkatan terhadap DAU dan peningkatan yang sama terjadi pula pada Pendapatan Asli Daerah.

Secara teoritis perkembangan DAU mempunyai kolerasi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Merangin ada kolerasi positif antara keduanya semakin besar DAU akan semakin besar PDRB karena DAU adalah input yang berupa dana yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan sehingga terdapat kolerasi yang kuat antara DAU dengan PDRB. PDRB Kabupaten Merangin berdasarkan harga konstan Pada tahun 2002 sebesar 721.245.000.000 dengan perkembangan sebesar 16,08 persen, pada tahun 2007 sebesar 955.063.430.000 dengan perkembangan sebesar 7,01 persen dan PDRB pada tahun 2013 sebesar 1.460.205.642.000 dengan perkembangan sebesar 6,59 persen.

Data observasi awal yang diperoleh diatas menunjukkan bahwa peningkatan DAU juga diikuti dengan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga diperoleh dugaan bahwa peningkatan DAU kemungkinan memiliki peranan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Merangin dan antara DAU dengan PDRB Kabupaten Merangin terdapat hubungan yang kuat dan positif. Untuk mendapatkan kepastian atas dugaan tersebut maka diperlukan adanya penelitian yang lebih ilmiah. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menuangkannya kedalam bentuk skripsi berjudul "Peranan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Hubungannya dengan PDRB Kabupaten Merangin

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Didalam analisis ini data yang digunakan adalah jenis data sekunder berbentuk time series dari tahun 2001 sampai 2013 yaitu Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja SKPD DPPKAD di Kabupaten Merangin. Sumber data tersebut di peroleh dari DPPKAD

Kabupaten Merangin, data yang digunakan penulis juga bersumber dari penelitian-penelitian sebelumnya, jurnal, dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Selain data sekunder juga digunakan data primer adapun jenis data yang dibutuhkan yaitu DAU, APBD, dan PDRB.

Metode Analisis Data

Analisis Deskriptif dan Kuantitatif.

Untuk menjawab tujuan pertama. Untuk menghitung peningkatan variabel penelitian Merangin periode 2001-2013 digunakan rumus dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$Pg(t) = \frac{Pg(t) - Pg(t-1)}{Pg(t-1)} \times 100\% \dots\dots\dots (3.1)$$

Keterangan:

$Pg(t)$ = Pertumbuhan realisasi penerimaan DAU tahun t

$Pg(t-1)$ = Data DAU tahun t-1

Untuk mengetahui pertumbuhan DAU dalam periode penelitian digunakan rumus:

$$Pg = \frac{Pg(t) - Pg(n)}{n} \times 100\% \dots\dots\dots (3.2)$$

Keterangan:

Pg = Pertumbuhan realisasi penerimaan DAU

$Pg(1)$ = Data DAU sebelumnya

$Pg(n)$ = Data DAU tahun sesudahnya

n = DAU

Untuk mengetahui kontribusi DAU terhadap penerimaan Daerah Kabupaten Merangin maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{DAU}{Penerimaan Daerah / PAD} \times 100 \dots\dots\dots (3.3)$$

Keterangan:

K = Kontribusi DAU terhadap PAD (%)

Analisis Kolerasi

Untuk menjawab tujuan kedua yaitu hubungan antara DAU dengan PDRB di Kabupaten Merangin dengan rumus yang dikenal dengan kolerasi pearson.

$$r = \frac{(n \sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}} \dots\dots\dots (3.4)$$

dimana:

$r =$ Koefisien korelasi pearson $x =$ DAU

$y =$ Pertumbuhan Ekonomi

nilai koefisien korelasi ini terletak antara -1 dan 1 artinya

- Jika nilai $r = 0$ hubungan antara kedua variable lemah sekali tidak terdapat hubungan sama sekali.
- Jika nilai $r = 1$ atau mendekati 1 maka korelasi antara kedua variable dikatakan kuat dan positif.
- Jika nilai $r = -1$ maka korelasi antara kedua variable dikatakan sangat kuat dan negatif.
- Jika $r = 0$ tidak ada korelasi.
- Jika $0 < r \leq 0,20$ korelasi, sangat rendah/lemah tapi pasti
- Jika $0,20 < r \leq 0,40$ korelasi, rendah/lemah tapi pasti
- Jika $0,70 < r \leq 0,90$ korelasi, sangat tinggi, kuat
- Jika $0,90 < r \leq 1,00$ korelasi, sangat tinggi, kuat sekali Jika $r = 1$ korelasi sempurna.

Definisi Operasional Variable

- Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan.
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebagai alat ukur untuk mengetahui struktur ekonomi suatu wilayah, diyakini masih merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan arah pembangunan.
- Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan oleh jumlah masing-masing sektor dari suatu variabel terhadap jumlah total variabel itu sendiri dalam satuan persentase.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan DAU dan Kontribusi Dengan APBD di Kabupaten Merangin

Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Merangin yang cukup potensial, hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan DAU dan kontribusinya dengan APBD di Kabupaten Merangin tahun 2001-2013.

Tabel.5.1 Perkembangan DAU Kabupaten Merangin.

Tahun	DAU (Rp)	Perkembangan (%)
2001	128.574.675.000	-
2002	131.355.291.336	2,16
2003	156.338.370.000	19,01
2004	160.886.244.938	2,90
2005	176.474.000.000	9,68
2006	276.442.827.000	56,64
2007	284.584.000.000	2,94
2008	339.161.139.000	19,17
2009	346.136.000.000	2,05
2010	352.586.125.000	1,86
2011	416.126.312.000	18,02
2012	509.653.986.000	22,47
2013	565.160.895.000	10,89
Rata-rata		12,90

Dari tabel diatas dapat bahwa selama kurun waktu 2001-2013 DAU yang diterima oleh Kabupten Merangin menunjukkan kecendrungan meningkat. Laju pertumbuhan penerimaan DAU terbesar terjadi pada tahun 2006, yaitu sebesar 56,64 persen. Tingginya laju pertumbuhan DAU pada tahun ini disebabkan karena disebabkan meningkatnya belanja pegawai karena adanya kenaikan pegawai juga disebabkan karena meningkatnya belanja barang yang disebabkan kenaikan harga-harga barang. Rendahnya laju pertumbuhan penerimaan DAU terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 1,86 persen ini disebabkan terjadinya perubahan secara signifikan beberapa indikator perhitungan DAU, seperti jumlah penduduk, miskin dan sebagainya. Faktor lain disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana bagi pembiayaan pembangunan di daerah Kabupaten/Kota. Secara rata-rata selama periode 2003-2013 pertumbuhan DAU Kabupaten Merangin adalah sebesar 12,90 persen pertahun.

Kontribusi DAU Kabupaten Merangin

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat hingga saat ini sumbangan DAU dalam stuktur pengeluaran pemerintah masih sangat besa`r. Hal ini bertujuan agar terjadinya pemerataan fiskal antar wilayah di Indonesia. DAU merupakan solusi dari adanya perbedaan potensi sumber daya alam antar daerah di Indonesia. Selama periode 2001-2013 kontribusi DAU menunjukkan kecendrungan yang terus meningkat, sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2 Kontribusi DAU dengan Kabupaten Merangin

Tahun	Penerimaan Daerah	DAU (Rupiah)	Kontribusi DAU (%)
2001	191.987.983.000	128.574.675.000	-
2002	198.531.245.000	131.355.675.000	66,16
2003	205.734.050.000	156.338.370.000	75,90
2004	220.754.254.393	160.886.244.938	72,89
2005	249.525.428.465	176.474.000.000	70,72
2006	381.629.494.387	276.442.827.000	74,57
2007	425.943.457.470	284.584.000.000	66,81
2008	433.286.010.081	339.161.139.000	78,27
2009	509.447.724.841	346.136.000.000	67,94
2010	550.451.389.841	352.586.125.000	64,05
2011	685.257.159.963	416.126.312.000	60,72
2012	773.083.169.720	509.653.986.000	65,92
2013	951.773.250.895	565.160.895.000	59,38
Rata-rata			63,33

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin.

Dari tabel diatas dapat kita bahwa kontribusi DAU menunjukkan kecendrungan yang meningkat dan positif. Kontribusi DAU terbesar terjadi pada tahun 2008 sebesar 78,27 persen, ini disebabkan meningkatnya belanja pegawai yang digunakan untuk gaji pegawai, Kontribusi terbesar kedua terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 74,57 persen. Kemudian kontribusi terkecil terdapat pada tahun 2012 yaitu sebesar 60,72 persen, kemudian disusul kontribusi terkecil kedua terdapat pada tahun 2010 sebesar 64,05 persen ini disebabkan karena penurunan kemampuan keuangan negara, faktor lainnya adalah karena

adanya peningkatan sumber penerimaan daerah, terutama adanya dana perimbangan berupa bagi hasil pajak dan bukan pajak sebagai salah satu komponen transfer pusat kepada daerah. Rata-rata kontribusi DAU tahun 2003-2012 sebesar 63,33 persen.

Hubungan PDRB dengan DAU kabupaten Merangin

Hubungan PDRB dengan DAU merupakan hubungan secara fungsional karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB, yaitu dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini mengidentifikasi akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Merangin selama periode 2003 sampai 2012 tanpa migas berdasarkan harga konstan cenderung meningkat dan positif. Untuk lebih jelasnya perkembangan PDRB Kabupaten Merangin atas dasar harga konstan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5.3. Perkembangan PDRB Kabupaten Merangin Tahun 2003-2012 Berdasarkan Harga Konstan

Tahun	PDRB AHK (Tanpa Migas) (Dalam Rupiah)	Perkembangan (%)	DAU (Dalam Rupiah)	Perkembangan DAU (%)
2001	621.322.000.000	-	128.574.675.000	-
2002	721.245.000.000	16,08	131.355.291.336	2,16
2003	772.010.050.000	7,03	156.338.370.000	19,01
2004	809.472.100.000	12,11	160.886.244.938	2,90
2005	851.507.760.000	5,19	176.474.000.000	9,68
2006	892.418.590.000	4,80	276.442.827.000	56,64
2007	955.063.430.000	7,01	284.584.000.000	2,94
2008	1.012.318.880.000	5,99	539.161.139.000	19,17
2009	1.097.537.220.000	8,41	346.136.000.000	2,05
2010	1.183.697.850.000	7,83	352.586.125.000	1,86
2011	1.266.789.650.000	7,01	416.126.312.000	18,02
2012	1.369.911.088.566	8,14	509.653.986.000	22,47
2013	1.460.205.642.000	6,59	565.160.895.000	10,89
	Rata-rata	7,39		12,90

Sumber: DPPKAD Kabupaten Merangin

Dari tabel diatas kita bahwa laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Merangin periode tahun 2001 sampai tahun 2013 berdasarkan harga konstan menunjukkan perkembangan yang tidak stabil atau berflutuasi. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Merangin tanpa migas berdasarkan harga konstan tertinggi terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 16,18 persen, Sedangkan pertumbuhan PDRB tanpa migas yang terendah terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 4,80 persen. Secara rata-rata laju pertumbuhan PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan Kabupaten Meangin sebesar 7,39 persen. Semakin besar PDRB daerah maka dikatakan perekonomian daerah tersebut semakin baik. Selain itu juga pertumbuhan

ekonomi juga dijadikan oleh pemerintah dalam menentukan atau menyusun kebijaksanaan dalam pembangunan ekonomi dimasa akan datang, terutama daerah kota/kabupaten diharapkan mampu mengelola keuangan daerah nya dengan baik.

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan rumus kolerasi pearson maka, Hubungan antara PDRB dengan DAU maka diperoleh angka sebagai berikut : $r = 0,81\%$ artinya kolerasi (hubungan) antara variable PDRB dengan DAU sangat kuat dan positif (apabila PDRB meningkat 1% maka DAU akan meningkat 0,81%. Keterkaitan yang kuat antara PDRB dengan DAU dalam periode 2001 sampai 2013 membuktikan kebenaran hipotesis yang telah dibangun dan sejalan dengan kerangka teoritis serta menunjukkan ada dampak positif DAU tersebut.

Permasalahan-Permasalahan Peningkatan DAU

Untuk mengatasi persolaan ketimpangan antar daerah pemerintah memberikan tranfer dana ini yang paling memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Pemberian otonomi transfer dana ini diharapkan dapat mengurangi disparitas fiskal serta agar daerah mempunyai tingkat kesiapan fiskal yang relative sama dalam mengimplementasikan otonomi daerah. Dalam beberapa tahun berjalan proporsi DAU terhadap daerah masih yang tertinggi dibandingkan penerimaan daerah lain termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama Pemerintah daerah untuk membiyai operasi utamanya sehari-hari yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungan APBD. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah tidak sama besarnya karena banyak faktor yang menentukan suatu daerah tersebut untuk memperoleh jumlah DAU yang akan ditranfer pemerintah pusat kepemerintah daerah, salah satunya Kabupaten Merangin yang mendapatkan tranfer DAU dari pemerintah pusat.

Adapun jawaban responden, maka dapat disimpulkan beberapa pemasalahan yang terjadi dalam penigkatkan pendapatan DAU kabupaten Merangin sebagai berikut:

Transfer daerah belum mampu mengakomodasi kepentingan pembangunan di daerah termasuk munculnya ketidaksesuaian antara kebutuhan dan peruntukan alokasi anggaran sehingga dianggap mencederai rasa keadilan daerah. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebutkan tidak sejalan dengan kebijakan pusat sehingga mengganggu perencanaan anggaran penerimaan pusat. Juga, kualitas belanja daerah tidak terjaga, terlihat pada rendahnya belanja daerah dibanding belanja pegawai serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Menurut DPRD Kabupaten Merangin, daerah memiliki keterbatasan anggaran, usaha untuk menggali sumber PAD Daerah tidak dapat dilakukan mengingat sumber-sumber penerimaan daerah telah dicatat oleh Pusat sesuai dengan batasan peraturan perundang- undangan. Sebagai implikasinya. Daerah tidak mampu melepaskan ketergantungan diri terhadap Pusat. Untuk itu, perlu ada dikotomi jelas antara sumber penerimaan daerah (PAD) dengan sumber-sumber penerimaan APBN, sehingga cap pemerintah daerah selalu memiliki ketergantungan kepada pemerintah pusat dapat dihindari. Persoalan belanja daerah yang terlihat terkonsentrasi pada belanja pegawai, merupakan tantangan bagi Daerah. Prinsipnya, Dana Alokasi Umum (DAU) dari transfer daerah digunakan untuk membiyai belanja pegawai, dan persentase besaran belanja pegawai tidak dapat diubah begitu saja mengingat sumber penerimaan daerah adalah murni berasal dari PAD dan DAU.

Persoalan lainnya adalah, ketidaksesuaian kebijakan pemerintah terhadap kondisi daerah. Sejumlah kebijakan dinilai menyulitkan daerah, Hal tersebut terjadi akibat Pusat tidak partisipatif dalam menyusun rumusan kebijakan tersebut karena Daerah hanya dianggap sebagai faktor obyektivitas saja. Regulasi atau kebijakan juga tidak sesuai

dengan kondisi daerah, antara lain regulasi keuangan yang dianggap membelenggu daerah dalam melaksanakan otonomi, sehingga mematikan inisiatif daerah. Ini berakibat kepada berkurangnya pelayanan terhadap masyarakat dan membuat dana daerah menumpuk pada Bank Indonesia. Selain itu juga lobi pemerintah daerah ke pemerintah pusat juga menjadi masalah bagi pemerintah daerah Kabupaten Merangin untuk meningkatkan DAU, karena jika tidak terjalinnya hubungan baik atau kerja sama yang baik antara pemerintah daerah Kabupaten Merangin dengan pemerintah daerah juga bisa menjadi satu masalah untuk meningkatkan pendapatan DAU.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perkembangan DAU Kabupaten Merangin tahun 2001 sampai 2013 rata-rata sebesar 12,90 %, dan rata-rata presentase kontribusi DAU Kabupaten Merangin tahun 2001 sampai 2013 sebesar 63,33%
2. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Hubungan DAU dengan PDRB Kabupaten Merangin di peroleh angka r sebesar 0,81% yang artinya antara DAU dengan PDRB sangat kuat dan positif.
3. Adapun permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Merangin dalam meningkatkan Dana Alokasi Umum (DAU),
4. ketidaksesuaian antara kebutuhan dan peruntukan alokasi anggaran sehingga dianggap mencederai rasa keadilan daerah. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebutkan tidak sejalan dengan kebijakan pusat sehingga mengganggu perencanaan anggaran penerimaan pusat. Juga, kualitas belanja daerah tidak terjaga, terlihat pada rendahnya belanja daerah dibandingkan belanja pegawai serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas.
5. Tidak sesuai kebijakan pemerintah terhadap kondisi daerah. Regulasi atau kebijakan juga tidak sesuai dengan kondisi daerah, antara lain regulasi keuangan yang dianggap membelenggu daerah dalam melaksanakan otonomi, sehingga mematikan inisiatif daerah. Ini berakibat kepada berkurangnya pelayanan terhadap masyarakat dan membuat dana daerah menumpuk pada Bank Indonesia.
6. Lobi antara kepala daerah Kabupaten Merangin ke pemerintah pusat juga menjadi masalah bagi pemerintah Kabupaten Merangin, dalam meningkatkan DAU.

Saran

Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin hendaknya Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Merangin, bisa dapat dilakukan dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Secara secara ekstensifikasi pemerintah daerah seharusnya dapat mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari dan hendaknya pemerintah Kabupaten Merangin mengupayakan peningkatan kinerja pegawai lapangan supaya mendata kembali sumber-sumber penerimaan daerah supaya bisa meningkatkan penerimaan daerah lebih besar lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Ngurah 2008 *Teori Ekonomi Mikro suatu Analisis Produksi Terapan*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Anomin. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan retribusi*

Daerah sebagai dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.

Dahmiri, S. D. (2010). Model Permintaan Hutang Luar Negeri Pemerintah dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora*, 12(1), 43409.

Dornbush Ruanger 2004. *Macro economic*, New York MC.Grawhill.

Mahmudi 2009 *Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ERLANGGA. Jamli Ahmad 1996 *Teori ekonomi makro*, Penerbit BPFE-Yogyakarta. Dayan Anto 2001. *Statistik*, Universitas Indonesia Press.

Mardiasmo,2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.Landasan Teori Mengenai” Dana Alokasi Umum DAU) “ download dari <http://www.google.com>.

Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah “ jakarta.

Putri Hartina, 2011, *Analisis Peranan Dana Alokasi Umum Dalam Pemerataan kemampuan Kemampuan Keuangan Daerah*.

Sudono Sukirno 2010. *Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Tan 2010. *Perencanaan Ekonomi fakultas Ekonomi Universitas Jambi*.